



Article Informations
Corresponding Email:
eprmata2817@gmail.com

Received: 16/08/2024; Accepted:
08/02/2025; Published: 17/02/2025

PERAN UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI AFGHANISTAN 2021 – 2023

Endah Permatasari¹⁾, Yusep Ginanjar²⁾, Anggun Dwi Panorama³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Kembalinya kelompok Taliban telah memperketat aturan dengan memberikan pembatasan ekstrem terhadap hak – hak perempuan dan media. Selama dua tahun terakhir, pihak berwajib Taliban telah mengabaikan hak-hak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, bergerak, dan berkumpul. Melihat keadaan yang ada dengan sejarah konflik yang panjang dan tidak berhenti terjadi. Komunitas internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengadakan konferensi yang menghasilkan *Bonn Agreement*. Berdasarkan pada keputusan itu dihasilkanlah pembentukan UNAMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami mengenai peran *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan. Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian library research, dimana data pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis isi yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur terkait. Analisis ini memberikan pemahaman mengenai upaya yang dilakukan UNAMA dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa UNAMA berperan dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan meskipun tidak secara signifikan. Adapun upaya yang dilakukan UNAMA melalui pemantauan, dokumentasi dan advokasi serta kolaborasi dengan berbagai organisasi atau pihak lain untuk memajukan hak – hak perempuan di Afghanistan.

Kata Kunci : Taliban, UNAMA, Diskriminasi, Afghanistan

Abstract

The return of the Taliban group has tightened the rules by placing extreme restrictions on women's rights and the media. Over the past two years, Taliban authorities have ignored women's rights to education, employment, movement and assembly. Seeing the existing situation with a long and ongoing history of conflict. The international community led by the United States held a conference that resulted in the Bonn Agreement. Based on this decision, UNAMA was formed. This research aims to explore the role of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in providing protection for women in Afghanistan. The type used in this research uses a qualitative descriptive approach with a library research type of research, where the data in this research is analyzed using content analysis sourced from books, journals and related literature. This analysis provides an understanding of the efforts made by UNAMA to provide protection for women in Afghanistan. The results of this research show that UNAMA plays a role in providing protection for women in Afghanistan, although not significantly. The efforts made by UNAMA are through monitoring, documentation and advocacy as well as collaboration with various organizations or other parties to advance women's rights in Afghanistan.

Keywords : Taliban, UNAMA, Discrimination, Afghanistan

PENDAHULUAN

Terbitnya *Universal Declaration of Human Right* telah mewajibkan setiap anggota masyarakat internasional untuk tidak mencabut, membatalkan, dan melakukan pelanggaran terhadap hak – hak yang berkaitan, baik itu dari aspek hukum, politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. Namun, nyatanya masih banyak kasus yang masih mendiskriminasikan perempuan seperti yang terjadi di Afghanistan. Dilansir dari halaman *Voice of America Indonesia.com* menyebutkan bahwa Afghanistan merupakan negara yang paling represif bagi perempuan. Adanya peningkatan tindak diskriminatif di Afghanistan tidak terlepas dari kembalinya pemerintahan Taliban di Afghanistan. Taliban merupakan salah satu kelompok ekstremis agama yang telah menerapkan aturan keras di Afghanistan. Meskipun, jatuhnya pemerintahan Taliban pada tahun 2001 seringkali digambarkan dengan kemenangan melawan terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, pengaruh Taliban dan kelompok oposisi bersenjata lainnya kembali tumbuh secara stabil di seluruh Afghanistan.

Pada 15 Agustus 2021 kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan. Kelompok Taliban telah memperketat aturan dengan

memberikan pembatasan ekstrem terhadap hak – hak perempuan dan media. Selama dua tahun terakhir, pihak berwajib Taliban telah mengabaikan hak-hak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, bergerak, dan berkumpul. Taliban telah memberlakukan sensor meluas terhadap media dan akses ke informasi dan semakin sering menahan jurnalis dan pengkritik lainnya. Penelitian *Human Right Watch* sejak tahun 2021 di Afghanistan telah menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa persekusi yang mengincar perempuan telah diberlakukan melalui berbagai keputusan baik tertulis atau berupa pengumuman. Keputusan – keputusan tersebut telah membatasi kebebasan bergerak, berekspresi, dan berserikat, larangan untuk bekerja di hampir semua jenis pekerjaan, larangan mengakses pendidikan menengah dan tinggi, serta mengizinkan penangkapan sewenang-wenang sehingga menimbulkan pelanggaran hak atas kebebasan. Hasilnya adalah hilangnya banyak pekerjaan dan khususnya pemecatan terhadap banyak perempuan dari pekerjaan mereka, serta larangan bagi perempuan untuk bekerja di organisasi kemanusiaan kecuali di daerah-daerah terbatas. Selain itu, perempuan tidak diberi akses untuk mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi.

Dilansir dari laman *Human Right Watch* tercatat bahwa pada 24 Desember 2022, kelompok Taliban telah mengumumkan pelarangan bagi perempuan untuk bekerja dengan semua organisasi non-pemerintah lokal dan internasional, termasuk PBB, dengan pengecualian untuk bidang kesehatan, gizi, dan pendidikan. Meskipun demikian, hal ini sangat merugikan mata pencaharian perempuan, karena akan mempersulit perempuan menerima bantuan jika perempuan Afghanistan tidak terlibat dalam proses distribusi dan pemantauan. Krisis ini secara tidak proporsional telah merugikan perempuan, yang sangat kesulitan mendapatkan akses ke makanan, perawatan kesehatan, dan perumahan. (Watch, 2023) Di sisi lain, sejak kembalinya Taliban pada tahun 2021 Taliban telah kesulitan mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini tidak terlepas dari pengakuan bahwa Taliban harus mampu menjunjung tinggi kewajiban internasional, prinsip – prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum, dan

hal yang terpenting adalah perlindungan terhadap hak perempuan. Sejalan dengan Pasal 7 konstitusi Afghanistan tahun 2004 yang menyatakan bahwa negara wajib menjunjung Deklarasi Hak Asasi Manusia, *Charter of the United Nations*, dan semua perjanjian luar negeri lainnya yang telah diratifikasi Afghanistan.

Meskipun, Taliban langsung menghapuskan konstitusi tahun 2004 ketika kembali berkuasa pada tahun 2021 karena dianggap sebagai bagian dari pemikiran dan gagasan dari bangsa barat. Taliban untuk sementara menerapkan konstitusi 1964 yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum islam sambil menunggu adanya penyusunan konstitusi baru. Menurut Pasal 3 Konstitusi, tidak ada undang-undang yang boleh melanggar prinsip dan aturan agama islam yang dihormati di Afghanistan. Namun, pada saat Taliban menyusun konstitusi baru, terdapat konflik antara peran Islam dan tugas internasional Afganistan, sehingga menghasilkan konstitusi yang penuh ambiguitas. Sehingga, posisi Afghanistan tetap harus mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, perjanjian antarnegara, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Afghanistan sebelumnya. Melalui ratifikasi CEDAW pada tahun 2003, Afghanistan dianggap mempunyai kewajiban mengambil keputusan untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Meskipun, Pemerintahan Afghanistan masih berada di posisi ambiguitas dibawah kepemimpinan Taliban. Namun, Afghanistan telah terikat dengan konstitusi dan perjanjian internasional. Dimana, pasal 2 konstitusi Afghanistan menyatakan bahwa negara harus *"menetapkan perlindungan yang sama bagi perempuan dengan mengubah atau menghapus undang-undang, praktik, dan adat istiadat yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan"* untuk memajukan kesetaraan gender melalui konstitusi nasional atau melalui undang – undang.

Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada dasarnya adalah tugas negara. Dengan demikian, Taliban selaku pemerintahan *de facto* tidak cukup hanya mencari dukungan lokal namun diperlukan pengakuan dari negara lain maupun internasional agar mampu

menjalankan hubungan internasional dan diterima di dunia internasional Hal ini dilakukan Taliban dengan mencoba menjalankan mandat Dewan Keamanan untuk secara aktif memerangi terorisme, serta penghentian pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan, agar dengan demikian Taliban dianggap telah memenuhi kewajiban internasional mereka berdasarkan perjanjian hak asasi manusia yang relevan. Namun, Taliban gagal dalam menjalankan mandat tersebut. Sehingga, Taliban tidak mendapatkan pengakuan meluas akibat kegagalan Taliban dalam mematuhi perjanjian internasional.

Melihat keadaan yang ada dengan sejarah konflik yang panjang dan tidak berhenti terjadi. Komunitas internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengadakan konferensi yang menghasilkan Bonn Agreement. Berdasarkan pada keputusan itu didapatkan hasil untuk menstabilkan dan merekonstruksi Afghanistan yaitu melalui pembentukan UNAMA. Namun, seiring dengan perkembangan konflik yang ada. UNAMA selaku entitas PBB berkembang dengan memfokuskan diri untuk memajukan dan mendukung bantuan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip – prinsip kemanusiaan, human rights, kesetaraan bagi perempuan dan anak perempuan, pemerintahan yang inklusif, ketahanan, dan stabilitas ekonomi dalam mengupayakan perdamaian dan stabilitas Afghanistan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan liberalisme institusional dalam hubungan internasional. Menurut liberalisme institusional, organisasi internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Dimana dasar berpikir teori liberalisme didasarkan pada pemikiran Woodrow Wilson mengenai kegunaan dari suatu institusi internasional. Menurut liberalisme institusional didalam suatu lembaga hubungan internasional, institusi dapat memberikan dampak terhadap perilaku pemerintahan. Dimana bentuk kerja sama maupun konflik dapat dimengerti di dalam konteks lembaga atau institusi yang menolong untuk memberikan penjelasan terkait makna pentingnya suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh setiap negara.

Adapun, penelitian ini juga menggunakan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Maka, menurut Clive Archer peranan organisasi internasional dibagi menjadi 3 kategori yang meliputi;

1. Sebagai Aktor, organisasi internasional dapat berdiri sendiri secara independen atau mandiri. Dimana organisasi internasional dapat bertindak sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
2. Sebagai arena atau forum dimana tindakan – tindakan dilakukan. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi para anggotanya untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat, bekerja sama, atau bahkan menyampaikan pendapat.
3. Sebagai instrument, organisasi internasional digunakan oleh negara – negara sebagai instrumen selektif untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri ataupun digunakan untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menyelaraskan tindakan.

Berdasarkan pada peran dan organisasi internasional diatas. Maka yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisa peran organisasi internasional dalam permasalahan diskriminasi yang terjadi pada perempuan dan anak di Afghanistan. Dengan menggunakan konsep teori peranan yang dikemukakan oleh Clive Archer. Dimana terdapat 3 kategori peranan organisasi internasional yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor. Berdasarkan pada peranan – peranan diatas, menurut Clive Archer ketiga peranan tersebut dapat saling berkaitan. Meskipun tidak dipungkiri seringkali menjadi sebuah kontradiktif sebab suatu organisasi internasional tidak dapat berperan dengan baik sebagai instrumen karena adanya kecenderungan bergantung pada agenda daripada aktor lain.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mencapai tujuan untuk mengungkap permasalahan yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan atau menjelaskan pemecahan masalah yang ada pada saat ini berdasarkan data – data. Penelitian deskriptif sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Penelitian ini berfokus pada peran organisasi internasional

dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan di Afghanistan. Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian deskriptif sebagai langkah dalam menggambarkan dan menganalisis peran organisasi internasional dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan. (Sugiyono, 2013)

PEMBAHASAN

1) Peran *United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)* dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan

Penghormatan terhadap hak asasi manusia terhadap seluruh masyarakat Afghanistan merupakan sebuah prioritas bagi UNAMA. Peran UNAMA dalam hal ini menyerukan agar setiap pelanggaran terkait hak asasi manusia diselidiki. Strategi ini dilakukan UNAMA melalui penelitian, pemantauan, dokumentasi pelaporan dan advokasi dengan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan resolusi 2678 pada 16 Maret 2023 yang di amanatkan oleh DK PBB. Adapun fokus UNAMA pada bidang ini meliputi beberapa hal seperti perlindungan warga sipil, hak atas hidup dan integritas fisik, hak – hak perempuan, tahanan, anak – anak dan konflik bersenjata serta kebebasan mendasar. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini berfokus pada program UNAMA mengenai perlindungan perempuan di Afghanistan melalui penghormatan hak asasi manusia terhadap hak – hak perempuan serta kebebasan mendasar.

Pada permasalahan ini, UNAMA terus menjalankan perannya dengan terus berupaya melakukan pelaporan terkait aspek-aspek hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dengan badan-badan PBB terkait. Selain itu, pendokumentasian dan pelaporannya menginformasikan upaya untuk memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Sehingga dengan langkah ini diharapkan tidak akan terjadi impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peranan organisasi internasional yang dikemukakan oleh Cliver Archer dalam membantu analisis penulis yaitu sebagai berikut;

a. Peran UNAMA sebagai Aktor

Peran UNAMA sebagai aktor adalah melakukan pemantauan, pelaporan, dan advokasi terkait aspek – aspek hak perempuan di Afghanistan. Dalam hal ini, UNAMA melakukan pemantauan terkait situasi perempuan di Afghanistan. Kembalinya kekuasaan Taliban pada Agustus 2021 telah menyebabkan kekhawatiran bagi perempuan Afghanistan mengingat posisi teo-politik Taliban yang konservatif terhadap peran perempuan. Berdasarkan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan UNAMA, indikasi pertama dari pembatasan penikmatan hak – hak perempuan adalah pembentukan kabinet sementara yang seluruhnya laki – laki pada tanggal 7 September 2021.

Dimana belum ada ruang untuk negosiasi mengenai inklusivitas gender. Hal ini diikuti dengan pengambilalihan fisik pada 18 September dan konservasi Gedung bekas Kementerian Urusan Perempuan menjadi Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan (MPVPV). Secara bersamaan tindak tersebut secara efektif telah menghilangkan hak perempuan atas partisipasi politik dan keterwakilan dalam forum pengambilan keputusan dan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai hal – hal yang berdampak bagi perempuan.

Dilanjut, berdasarkan salah satu pemantauan dan pelaporan UNAMA maka tanggal 19 September melalui catatan panduan kepada media, otoritas *de facto* telah mengatur aturan berpakaian bagi jurnalis perempuan dan melarang perempuan untuk berakting dalam film. Sedangkan pada Desember 2021, keputusan lebih lanjut otoritas *de facto* mengarahkan penejanaan pendamping keluarga laki – laki (mahram) yang dijabarkan lebih lanjut pada 26 Desember dan pemberlakuan aturan berpakaian perempuan yang diatur lebih lanjut pada 7 Mei 2022. Pada tanggal 3 Desember, pemimpin Taliban mengeluarkan dekrit tentang hak – hak perempuan. Adapun salah satu isu – isu utama yang diperuntukan bagi perempuan yaitu perempuan mempunyai hak untuk menyetujui pernikahan dan tidak dapat dipaksa untuk menikah dan Mahkamah Agung secara *de facto* harus

memastikan pengadilan mempertimbangkan permohonan yang melibatkan perempuan.

Berdasarkan pada pemantauan dan pelaporan yang dilakukan UNAMA atas keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas *de facto* kepada masyarakat Afghanistan termasuk Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan (MPVPV) keputusan tersebut memiliki dampak yang diskriminatif dan tidak proporsional terhadap perempuan serta penikmatan hak asasi manusia. Secara khusus, penerapan mahram dan hijab pada perempuan telah berdampak langsung pada penikmatan kebebasan bergerak karena mereka tidak dapat meninggalkan tempat tinggal tanpa keduanya. Sehingga, hal ini akan berpotensi memicu timbulnya pelecehan dan penganiayaan oleh otoritas *de facto* setempat atau perempuan tidak dapat mengakses layanan umum. Sementara itu, akses perempuan terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi masih menghadapi tantangan ditengah akses pendidikan laki – laki yang terus menikmati akses penuh. Sehingga sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, UNAMA HRS telah menerima 87 laporan pembunuhan, kekerasan, bunuh diri dan penyerangan lain atas tindak diskriminasi yang dilakukan pemerintah *de facto*. Namun, dari kasus-kasus tersebut tidak ada satupun yang diproses melalui sistem peradilan formal mengingat beragamnya situasi supremasi hukum dan banyaknya kasus yang dilaporkan dirujuk ke mekanisme penyelesaian sengketa tradisional.

Sementara itu, adapun tindakan advokasi yang dilakukan oleh UNAMA dalam hal ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan yaitu pemerintah Taliban. Rekomendasi kebijakan ini merupakan salah satu bentuk instrument yang digunakan dalam advokasi UNAMA untuk mengusulkan perubahan atau pembentukan kebijakan baru yang lebih berpihak pada publik. Adapun beberapa rekomendasi yang dilakukan UNAMA terhadap pemerintahan *de facto* dalam rangka memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan sebagai berikut;

- (1) Mengusulkan kepada otoritas *de facto* untuk meninjau kembali arahan mahram dan jilbab islam dan memperjelas sifat anjuran dan tidak wajibnya, untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan semua bidang kehidupan sehari – hari,

(2) Menjamin bahwa sistem peradilan formal sepenuhnya menangani pengaduan perempuan mengenai kekerasan berbasis gender dan praktik – praktik berbahaya dan mengenai permasalahan hukum perdata termasuk penyelesaiannya, mengganti kebijakan yang membatasi media dan kebebasan berkumpul secara damai dengan kebijakan yang sesuai dengan hak asasi manusia,

(3) Mempertimbangkan pembentukan lembaga hak asasi manusia nasional yang sejalan dengan prinsip Paris PBB, independen dari pemerintah, dengan mandat luas untuk melindungi dan memajukan semua hak asasi manusia di tingkat nasional, pluralistik, dengan semua sumber daya dan otonomi keuangan yang memadai.

(4) Pihak berwenang *de facto* harus mengkonfirmasi dan memperjelas kerangka hukum yang berlaku yang mengatur administrasi dan peradilan mengenai pengaduan kekerasan akibat pengaruh pembatasan yang ada berdasarkan hukum HAM internasional sejalan dengan kewajiban Afghanistan. Selain itu, otoritas *de facto* harus mendorong dan memfasilitasi pembentukan tempat penampungan perlindungan perempuan bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga kompeten lainnya di Afghanistan.

Peran UNAMA sebagai aktor dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan adalah dengan terus melakukan pemantauan, pendokumentasian, dan advokasi. Adanya upaya ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan terkait pelanggaran HAM dan memperkuat perlindungan perempuan di Afghanistan melalui advokasi terhadap pemerintah Taliban. Upaya ini merupakan bagian dari tanggungjawab UNAMA dalam memberikan perlindungan dengan memastikan bahwa hak – hak perempuan di Afghanistan dilindungi dan dihormati.

b. Peran UNAMA sebagai Arena

Peran UNAMA sebagai arena dalam hal ini adalah memfasilitasi dialog antara pimpinan senior PBB dan organisasi perempuan di Afghanistan mengenai implementasi resolusi 1325 terkait perempuan, perdamaian dan keamanan melalui penyelenggaraan *Global Open Days* di Kabul. *Global Open Days* merupakan kegiatan yang diluncurkan oleh PBB pada tahun 2010 untuk meninjau implementasi resolusi 1325. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dialog antara pimpinan senior PBB dan organisasi perempuan

di seluruh dunia mengenai implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) dan tujuh Resolusi PBB berikutnya. Dimana instrumen-instrumen ini melahirkan kepemimpinan perempuan dan partisipasi bermakna dalam transisi politik dan keamanan, termasuk pembangunan perdamaian.

Pada 18 November 2022, Lebih dari 100 perempuan di beberapa wilayah Afghanistan, dan dari berbagai latar belakang, organisasi dan entitas, terlibat dalam diskusi luas mengenai empat pilar Resolusi DK PBB 1325: partisipasi; perlindungan; pencegahan; dan bantuan & pemulihan. Dalam memfasilitasi dialog ini UNAMA bekerjasama dengan UN Women. Adapun dalam diskusi tersebut menghasilkan daftar rekomendasi kepada komunitas internasional, pihak berwenang dan perempuan itu sendiri. Hal ini mencakup, antara lain:

- (1) Agar PBB memfasilitasi dialog antara perempuan dan pihak berwenang;
- (2) Meminta PBB untuk membentuk mekanisme komunikasi yang memungkinkan perempuan untuk segera menyampaikan permasalahannya kepada pihak berwenang;
- (3) Agar PBB dan komunitas internasional terus menekan pihak berwenang mengenai perlunya penghormatan terhadap hak-hak perempuan;
- (4) Bagi pihak berwenang dan PBB untuk mengintensifkan upaya menuju kewirausahaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas dan pendidikan;
- (5) Untuk pencegahan dan pertanggungjawaban kasus kekerasan terhadap perempuan; dan
- (6) Agar perempuan meninggalkan praktik budaya yang merugikan dan melanggengkan ketidaksetaraan dan penindasan gender.

Dalam kerangka ini, jika dianalisis menggunakan konsep peranan yang dikemukakan oleh Cliver Archer. Peranan organisasi internasional sebagai arena adalah organisasi internasional menyediakan platform bagi negara – negara untuk berinteraksi, berdiskusi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam hal ini, negara – negara dapat berpartisipasi dalam dialog dan negosiasi. Berdasarkan pada hal itu, UNAMA selaku organisasi internasional

telah mencoba untuk membuka jalur komunikasi untuk membahas dan memperbaiki situasi hak asasi manusia dengan fokus khusus pada hak – hak perempuan melalui pengadaan *global open days*.

Selain itu, peran UNAMA sebagai arena dalam hal ini adalah memfasilitasi dialog dengan melakukan konsultasi perempuan di Afghanistan. Adapun konsultasi dilakukan secara langsung dan online serta telesurvei dengan perempuan Afghanistan di 33 provinsi dari 34 provinsi di Afghanistan bersama dengan UN Women dan IOM (*International Organization for Migration*). Dalam hal ini, tujuan UNAMA sebagai fasilitator melakukan konsultasi dengan perempuan di Afghanistan adalah untuk memperkuat suara perempuan Afghanistan di forum nasional dan internasional. Dalam konsultasi ini, UNAMA melakukan konsultasi dengan menjangkau 462 perempuan di 33 dari 34 provinsi. Proses ini melibatkan perempuan sebagai kepala keluarga, perempuan yang menjadi pengungsi internal, perempuan pedesaan, pinggiran kota dan perkotaan, perempuan yang bekerja dan menganggur dan perempuan berbeda yang didasarkan pada usia, status perkawinan, etnis dan latar belakang pendidikan. Adapun berdasarkan pada hasil konsultasi antara Agustus 2022 hingga Juli 2023, maka UNAMA telah menemukan sebagai berikut:

1. Akses terhadap Pendidikan tetap menjadi prioritas utama sejak Agustus 2022. Perempuan secara konsisten menekankan pentingnya hasil Pendidikan bagi kesetaraan gender dan pembangunan jangka Panjang Afghanistan.
2. Pada bulan Agustus 2022, peningkatan keselamatan dan keamanan perempuan, khususnya yang bekerja di sektor seperti Pendidikan tinggi, media, bisnis dan HAM merupakan prioritas kedua yang paling mendesak.
3. Dalam enam bulan terakhir, sejak Januari 2023, pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan telah menyusut dratis seiring dengan meningkatnya kemiskinan, rendahnya kontribusi keuangan perempuan dan semakin buruknya norma gender patriarki.

Sedangkan, hasil temuan lanjutan pada 2023 yang ditemukan pada konsultasi ini sebagai berikut:

1. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan yang luas, termasuk meningkatnya krisis mental di kalangan perempuan serta dampak negatif yang terkait dengan kemiskinan seperti pernikahan dini, kekerasan dan migrasi ilegal.
2. Perempuan menekankan bahwa tingkat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi mempengaruhi pengambilan keputusan di rumah tangga dan masyarakat. Hal ini menggambarkan Pendidikan dan pekerjaan sebagai kunci dalam memberikan perempuan legitimasi dan akses terhadap pengambilan keputusan. Sebab pembatasan saat ini beresiko memperkuat narasi yang sudah ada sebelumnya bahwa perempuan tidak memiliki pengetahuan atau kekuasaan, sehingga meninggalkan generasi perempuan tanpa kualifikasi dan keterampilan kepemimpinan.

Dalam kerangka ini, UNAMA menyediakan ruang bagi berbagai pihak di Afghanistan, termasuk perempuan untuk berdialog tentang isu – isu yang mempengaruhi. UNAMA dengan bertindak menjadi fasilitator memungkinkan adanya pertemuan antara perempuan Afghanistan dan pembuat kebijakan. Dimana pembuat kebijakan internasional dan lokal dapat merespons secara langsung. Sehingga peran UNAMA sebagai arena dapat dianalisis melalui fungsi dan tujuan dari konsultasi perempuan di Afghanistan tersebut. Konsep peranan Clive Archer menggambarkan bahwa sebagai arena, organisasi internasional menyediakan platform bagi negara – negara anggota ataupun aktor lain untuk berinteraksi, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah bersama.

Dalam hal ini, dengan mengumpulkan berbagai perspektif dari perempuan di seluruh Afghanistan yang secara garis besar memiliki pengalaman dan cara pandang berbeda di setiap wilayah. Maka diharapkan hasil dari konsultasi tersebut dapat memfasilitasi kolaborasi antara perempuan Afghanistan dan komunitas internasional, termasuk organisasi non-pemerintah dan badan – badan PBB dengan mengidentifikasi masalah bersama dengan bekerjasama melalui dialog yang terjadi dalam konsultasi tersebut. Dengan demikian, UNAMA telah menyediakan platform bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dialog dan proses pembuatan kebijakan serta memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

c. Peran UNAMA sebagai Instrument

Peran UNAMA sebagai instrument dalam hal ini adalah melakukan kerjasama bersama organisasi internasional dengan penyelenggaraan konsultasi perempuan di Afghanistan. UNAMA, *UN Migration* dan *UN Women* bekerjasama untuk menjalankan misi politik dengan tujuan bersama dalam mendukung pemerintah dan rakyat Afghanistan. Hal ini dilakukan dengan melakukan konsultasi secara langsung dan online serta telesurvei dengan perempuan Afghanistan di 33 provinsi dari 34 provinsi di Afghanistan. Adapun konsultasi dengan perempuan Afghanistan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat suara perempuan Afghanistan di forum nasional dan internasional. Dalam konsultasi ini, UNAMA beserta IOM dan UN Women melakukan konsultasi dengan menjangkau 462 perempuan di 33 dari 34 provinsi. Proses ini melibatkan perempuan sebagai kepala keluarga, perempuan yang menjadi pengungsi internal, perempuan pedesaan, pinggiran kota dan perkotaan, perempuan yang bekerja dan menganggur dan perempuan berbeda yang didasarkan pada usia, status perkawinan, etnis dan latar belakang pendidikan.

Dalam hal ini, perempuan terus mendesak PBB dan perwakilan internasional lain yang bertemu dengan pemerintah *de facto* untuk menekankan perlunya memasukan perempuan ke dalam separuh populasi melalui argumen berbasis efisiensi dan melibatkan anggota keluarga dan masyarakat laki – laki serta pemimpin agama untuk mendukung advokasi. Terkurungnya perempuan di rumah dan memburuknya hubungan sosial semakin membatasi kemampuan perempuan untuk memperoleh informasi dan pada gilirannya, sangat mengurangi akses perempuan terhadap layanan, termasuk bantuan kemanusiaan.

Perempuan sudah lama memiliki akses yang lebih sedikit terhadap informasi dibandingkan laki-laki dengan tingkat melek huruf, kepemilikan ponsel, dan akses internet yang lebih rendah. Kontak sosial informal yang penting bagi perempuan untuk memperoleh informasi sebagian besar telah terkikis melalui pembatasan. Akses terhadap informasi memungkinkan

perempuan untuk mengakses bantuan kemanusiaan dan membuat pilihan yang tepat mengenai kehidupan dan penghidupan mereka. Adanya konsultasi melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana pengalaman, harapan dan ketakutan perempuan agar pada nantinya bukti dan survei ini dapat memperkuat suara perempuan Afghanistan di forum nasional dan internasional.

Dalam konteks ini, UNAMA menggunakan konsultasi sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan perempuan di Afghanistan. Adanya konsultasi secara tidak langsung membantu UNAMA dalam merumuskan strategi dan meningkatkan efektifitas bagi negara – negara anggota PBB dalam mencapai tujuan bersama terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Selain itu, adanya kerjasama ini dapat mempermudah kinerja UNAMA untuk mencapai tujuan utama dalam mempromosikan hak asasi perempuan. Dengan demikian, konsultasi tidak hanya memperkuat peran UNAMA sebagai instrument bagi negara – negara anggota. Melainkan, memastikan bahwa suara perempuan Afghanistan didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan internasional.

Selanjutnya, peran UNAMA sebagai instrument adalah mempromosikan hak – hak perempuan melalui penyelenggaraan *Conference on Women in Islam*. Konferensi mengenai perempuan dalam Islam, Status dan Pemberdayaan ini diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama Islam pada 8 November 2023. Konferensi ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal OKI dan diselenggarakan oleh Kerajaan Arab Saudi, Ketua KTT Islam ke-14 dan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam konferensi ini telah dihasilkan ‘Dokumen Jeddah tentang hak – hak perempuan dalam islam’. Adapun pertimbangan selama konferensi ini menghasilkan dua puluh rekomendasi yang dimasukkan dalam Deklarasi Akhir. Rekomendasi-rekomendasi ini menyoroti mengenai hak-hak lanjutan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan dan status perempuan dalam Islam. Selain itu, dalam dokumen ini juga membahas mengenai tantangan dan peluang terkait hak-hak

perempuan dan peningkatan peran mereka dalam masyarakat di berbagai bidang dan di semua tingkatan. Dokumen ini juga dirancang untuk menjadi referensi resmi yang akan disampaikan di forum nasional dan internasional.

Adapun, peran UNAMA dalam hal ini adalah UNAMA menekankan bahwa PBB memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan terutama dibidang pendidikan dan pekerjaan. Sehingga dalam hal ini, adanya kerjasama UNAMA dan OKI dalam mendukung hak – hak dan pemberdayaan perempuan di dunia Islam. UNAMA sebagai instrument PBB menjalankan perannya dengan ikut berpartisipasi dan mendukung konferensi tersebut, sejalan dengan tujuan – tujuan PBB dalam memajukan hak – hak perempuan secara global. Adapun, hasil dan diskusi dari konferensi tersebut dapat mendukung upaya UNAMA dalam mempromosikan dan melindungi hak – hak perempuan Afghanistan. Sehingga dalam hal ini, UNAMA dapat menggunakan dokumen dan rekomendasi hasil *conference* tersebut untuk memperkuat perlindungan dan promosi hak – hak perempuan di Afghanistan dalam dialog dan advokasi dengan pemerintah Afghanistan.

Adapun dalam hal ini, UNAMA tidak hanya menjalankan peran untuk mendukung kegiatan peningkatan kesadaran untuk melawan salah tafsir tentang peran perempuan dalam hukum Afghanistan dan Islam. Namun, dalam kerangka ini UNAMA mencoba menyerukan kepada pemerintah Taliban untuk mendengarkan suara kolektif dunia muslim dan mengakui peran penting perempuan dalam transformasi pembangunan dan pertumbuhan sebuah bangsa. Adanya pembatasan yang diberlakukan oleh Taliban terhadap perempuan tidak hanya menjauhkan Afghanistan dari komunitas global. Tetapi, juga dapat menjadi ancaman bagi suatu negara.

KESIMPULAN

Kembalinya kelompok Taliban pada 15 Agustus 2021 telah menjadikan Afghanistan sebagai negara yang paling represif bagi perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tindak diskriminasi yang berakibat pada rentannya kekerasan berbasis gender, terutama bagi perempuan. Adanya

pembatasan terhadap hak – hak dasar perempuan secara tidak langsung telah menjadikan Afghanistan semakin terpuruk. Pada dasarnya, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah tugas negara. Namun, Afghanistan dibawah kepemimpinan Taliban telah membawa perempuan kedalam posisi terendah.

Melihat keadaan yang ada dengan sejarah konflik yang panjang dan tidak berhenti terjadi. Komunitas internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengadakan konferensi yang menghasilkan Bonn Agreement. Berdasarkan pada keputusan itu didapatkan hasil untuk menstabilkan dan merekonstruksi Afghanistan yaitu melalui pembentukan UNAMA. Namun, seiring dengan perkembangan konflik yang ada. UNAMA selaku entitas PBB berkembang dengan memfokuskan diri untuk memajukan dan mendukung bantuan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip – prinsip kemanusiaan, human rights dan kesetaraan bagi perempuan dan anak perempuan dalam mendukung perdamaian dan stabilitas Afghanistan.

Dengan tujuan utama untuk mendukung warga Afghanistan dalam mencapai perdamaian dan stabilitas negara tersebut. UNAMA hadir, salah satunya dengan memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan sebagai bagian dari populasi agar tercipta kemajuan dan stabilitas suatu negara. Dengan itu, perlu dipahami mengenai bagaimana peran UNAMA dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan tahun 2021 – 2023. Walaupun tidak memiliki dampak yang signifikan dan langsung dalam memberikan perlindungan perempuan. Namun, dalam menjalankan perannya sesuai dengan konsep peranan Clive Archer. Maka dapat disimpulkan bahwa UNAMA sebagai organisasi internasional telah berperan cukup besar dalam melindungi perempuan di Afghanistan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa UNAMA sebagai aktor independen telah berperan dengan melakukan pemantauan dan pelaporan yang sistematis dan memberikan dukungan dan perlindungan melalui advokasi. Adapun, tindakan advokasi yang dilakukan oleh UNAMA diharapkan adanya perubahan atau pembentukan kebijakan baru yang lebih berpihak pada publik terutama perempuan. Sedangkan

sebagai arena, UNAMA dalam telah berperan dalam memfasilitasi dialog dan pertemuan antara pimpinan PBB dan organisasi perempuan serta masyarakatnya.

Sedangkan sebagai instrument, UNAMA telah menjalankan perannya dengan ikut berpartisipasi dan mendukung konferensi seperti Conference on Women in Islam, sejalan dengan tujuan – tujuan PBB dalam memajukan hak – hak perempuan secara global. Adapun, hasil dan diskusi dari konferensi tersebut dapat mendukung upaya UNAMA dalam mempromosikan dan melindungi hak – hak perempuan Afghanistan. Selain itu, sebagai instrument UNAMA juga telah menggunakan konsultasi sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan perempuan di Afghanistan. Adanya konsultasi secara tidak langsung membantu UNAMA dalam merumuskan strategi dan meningkatkan efektifitas bagi negara – negara anggota PBB dalam mencapai tujuan bersama terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Sehingga, UNAMA sebagai instrument tidak hanya menciptakan ruang bagi aktor lain agar tercipta strategi demi tujuan bersama. Namun, ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung dan memajukan hak – hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Archer, Clive. *Introduction to International Relations : Power and Justice* . London: Allen & Unwin Ltd, 1983.

Barrfield, Thomas J. *Afghanistan : A Cultural and Political History* . United Kingdom: Priceton University Press, 2010.

Collins, Joseph J. *Understanding War in Afghanistan*. Washington DC: NDU Press, 2011.

- Fulthoni. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: The Indonesia Legal resource Center, 2009.
- Marks Field, Ramsha Ahmed. *A Review of the 2001 Bonn Conference and Application to the Road Ahead in Afghanistan*. Washington DC: NDU Press, 2001.
- Moleong, lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Rachman, Budhy Munawar -. *Islam dan Liberalisme*. Jakarta Selatan: Friedrich Naumann Stiftung, 2011.
- Scott Burchill, Andrew Linklater. *Teori - Teori Hubungan Internasional*. New York : ST Martins's Press, 1996.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Sorensen, Robert Jackson and Georg. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Oxford University Press, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wolfe, T.A. Coulumbus & J.H. *Introduction to International Relations : Power and Justice*. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1978.
- Asylum, European Union Agency for. *Key Socio - Economic Indicators in Afghanistan and in Kabul City*. Luxembourg: Publication Office of The European Union, 2022. 14.
- Stephen Mcglinchey, Rosie Walters. *International Relations Theory*. Bristol, England: E-International Relations Publishing, 2017.

Jurnal/Artikel

Amara Nurfahirah, Yulinda Try Dewi, Dini Dwi Gustiana. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan." *Jurnal Transborders* (2022): 102 - 113.

Center, Stimson. "REBUILDING AFGHANISTAN:: THE UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA)." *Stimson Center* (2002).

Fuadi, Ahmad. "1. Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (Unama) dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009 - 2012." *Jom FISIP Volume 1 No. 2* (2014): 1-14.

Ikhsana, Lisa. "The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles." *Jurnal Scientia Indonesia* (2020): 181 - 190.

Jones, Seth G. "War and Peace in Afghanistan ." *Center for Strategic and International Studies* (2020): 2-5.

Kadir, Aiyub. "State Responsibility of Afghanistan Under Taliban Regime." *Jurnal Media Hukum* (2023): 3.

Kfir, Isaac. "The Role of the Pashtuns in Understanding the Afghan Crisis." *Terrorism Research Initiative* (2009): 37-47.

Lestari, Oriza Dian. "Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam menghadapi Ancaman Operasi/Kebijakan Operatif Taliban." *Indonesia Journal of Peace and Security Studies Vol.3 No.2* (2021): 70-73.

Margesson, Rhoda. "United Nations Assistance Mission in Afghanistan : Background and Policy Issues." *Congressional Research Service* (2010): 1-20.

Nehan, Nargis. "The Rise and Fall Women Rights in Afghanistan." *LSE Public Policy Review* (2022): 2-8.

Rumadaul, Fitrah Awaliyah. "Peran United Nations Women Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan." *Global Political Studies Journal* (2017): 69-76.

Trianjani, Anisa. "Peran United Nations Women (UN Women) Dalam Menciptakan Kesetaraan Gender di Afghanistan." *JOM FISIP* (2022): 4-14.

Weigand, Florian. "Afghanistan's Taliban Legitimate Jihadists or Coercive Extremists?" *Journal of Intervention and Statebuilding* (2017): 5-9.

Website

Assembly, United States General. *Revised estimates Relating to the Programme budget for 2022 under section 3, Political Affairs, and section 36, Staff Assessment.* 9 Agustus 2022. <https://press.un.org/en/2022/gaab4397.doc.htm>. 27 Februari 2024.

Byrd, William. *Two Years into Taliban rule, New Shocks Weaken Afghan Economy.* 10 Agustus 2023. <https://www.usip.org/publications/2023/08/two-years-taliban-rule-new-shocks-weaken-afghan-economy>. 7 April 2024.

Cooperation, Organisation of Islamic. *International Conference on Women in Islam Concludes with the Adoption of "Final Declaration" and the "jeddah Document on Women's Rights in Islam .* 8 November 2023. https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=39902&t_ref=26747&lan=en. 20 Maret 2024.

Council, General Assembly Security. *Afghanistan Annual Country Report.* 2 September 2021. <https://unama.unmissions.org/>. 7 April 2024.

Indonesia, CNN. *Dua Tahun Berkuas, Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan.* 16 Agustus 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230816115117->

120-986739/dua-tahun-berkuasa-taliban-persekusi-ratusan-perempuan-afghanistan. 6 Maret 2024.

Mengenang 22 Tahun Tragedi Kelam Serangan 9/11. 12 September 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230911203105-134-997676/mengenang-22-tahun-tragedi-kelam-serangan-9-11>. 21 Februari 2024.

Taliban Larang Perempuan di Afghanistan Bekerja untuk PBB. 5 April 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230405011222-120-933647/taliban-larang-perempuan-di-afghanistan-bekerja-untuk-pbb>. 6 Maret 2024.

Jensch, Nele. *Larang Kuliah Oleh Taliban, Hak Perempuan Afghanistan Dirampas.* 24 Desember 2022. <https://www.dw.com/id/larangan-kuliah-taliban/g-64195022?ssp=1&setlang=en&cc=ID&safesearch=moderate>. 6 Maret 2024.

Katzman, Kenneth. *Afghanistan Post Taliban Governance, Security, and U.S. Policy.* 22 Desember 2015. <https://www.refworld.org/document-sources/united-states-congressional-research-service>. 21 Februari 2024.

Nations, United. *Fifth Committee Approves Draft Authorizing over \$130 Million to Operate United Nations Assistance Mission in Afghanistan during 2022.* 25 Oktober 2022. <https://press.un.org/en/2022/gaab4397.doc.htm#:~:text=Fifth%20Committee%20Approves%20Draft%20Authorizing,Meetings%20Coverage%20and%20Press%20Releases>. 6 Maret 2024.

Owen, Lara. *Perempuan Afghanistan harus pakai cadar : 'hati saya hancur ketika orang-orang di jalan meminta saya menutupi wajah'.* 12 Mei 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61420005>. 6 Maret 2024.

Pajhwok. *Women Indispensable Part of Development, Growth : UNAMA*. 9 November 2023. <https://pajhwok.com/>. 20 Maret 2024.

Press, Associated. *PBB : Afghanistan, Negara Paling Represif di Dunia*. 9 Maret 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-afghanistan-negara-paling-represif-di-dunia-bagi-perempuan/6996194.html>. 9 September 2023.

Report, Security Council. *Afghanistan Briefing and Consultation*. 20 Juni 2023.

<https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2023/06/afghanistan-briefing-andconsultations6.php#:~:text=On%205%20June%2C%20OCHA%20announced,billion%20down%20to%20%243.2%20billion>. 27 Februari 2024.

UNAMA. *Afghan Women Want Dialogue To Ensure Basic Rights*. 18 November 2022. <https://unama.unmissions.org/afghan-women-want-dialogue-ensure-basic-rights> . 23 Maret 2024.

Divergence of Practice : The Handling of Complaints of Gender-Based Violence against Women and Girls by Afghanistan's de facto Authorities. Desember 2023. <https://reliefweb.int/report/afghanistan/divergence-practice-handling-complaints-gender-based-violence-against-women-and-girls-afghanistans-de-facto-authorities-december-2023-endarips> . 22 Maret 2024.

Gender Equality. n.d. <https://unama.unmissions.org/gender-equality>. 2024 Maret 2024.

Good Offices . n.d. <https://unama.unmissions.org/good-offices>. 6 Maret 2024.

Human rights in Afghanistan : 15 Agustus 2021 to 15 June 2022. 20 Juli 2022. <https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-takeover> . 22 Maret 2024.

Human Rights. n.d. <https://unama.unmissions.org/human-rights>. 6 Maret 2023.

Human Rights. n.d. <https://unama.unmissions.org/human-rights>. 6 Maret 2024.

Human Rights in Afghanistan : 15 Agustus 2021 to 15 June 2022. 20 Juli 2022. <https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-takeover>. 24 Maret 2024.

Human Rights Situation in Afghanistan oct - Dec Update. n.d. <https://unama.unmissions.org/human-rights-monitoring-and-reporting-0> . 6 Maret 2024.

Inclusion of Women Voices in Peace Talks Stressed at Global Open Days Discussions. 28 Januari 2021. <https://unama.unmissions.org/inclusion-women-voices-peace-talks-stressed-global-open-days-discussions> . 23 Maret 2024.

Leadership. n.d. <https://unama.unmissions.org/leadership>. 21 Februari 2024.

Menon, Shruti. *Krisis Afghanistan: Bagaimana Bantuan Kemanusiaan ini sampai ke Warga?* 8 Februari 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60298401.amp> . 7 April 2024.

Regional Cooperation . n.d. <https://unama.unmissions.org/regional-cooperation>. 6 Maret 2024.

Situation of Afghan Women - Summary report of Country-wide Women Consultation. Januari 2022 - 2023. <https://unama.unmissions.org/>. 20 Maret 2024.

Summary Report of Country - Wide Women's Consultations. September 2023. <https://unama.unmissions.org/>. 20 Maret 2024.

UNAMA Activities. n.d. 21 Februari 2024.

UNICEF. *UNICEF Data Warehouse Indicator Youth Literacy rate for 15-24 years*. n.d.

https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=AFG.ED_15-24_LR.&startPeriod=1970&endPeriod=2023,. 2023 September 2023.

VoaIndonesia. *Taliban akan Tegakkan Aturan Hijab Meski Diprotes*. 11 Mei 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-akan-tegakkan-aturan-hijab-meski-diprotes/6566498.html>. 6 Maret 2024.

Taliban Berlakukan Larangan terhadap Salon Kecantikan di Afghanistan. 26 Juli 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-tegakkan-larangan-salon-kecantikan-di-afghanistan/7196020.html>. 6 Maret 2024.

Watch, Human Right. *Afghanistan Repression Worsens 2 Years into Taliban Rule*. 8 Agustus 2023. <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/08/afghanistan-repression-worsens-2-years-taliban-rule>. 9 September 2023.

Afghanistan Under the Taliban : the Crime Against Humanity of Gender Persecution. 8 September 2023. https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-under-taliban-crime-against-humanity-gender-persecution-endarips?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwwYSwBhDcARIsAOyL0fjvdLaOwgkcSbv6T19FHYHgkwCQ8unBrbOVHhvc4pnSjXYd_9051sMaArn4EALw_wcB. 22 Maret 2024.

Watch, Human Rights. *Afghanistan: Taliban's Gender Crimes Against Humanity*. 18 Agustus 2023. , <https://www.hrw.org/id/news/2023/09/08/afghanistan-talibans-gender-crimes-against-humanity>. 9 September 2023.

Worldometer. *Afghanistan Population*. 16 Juli 2023. https://www.worldometers.info/world-population/afghanistan-population/#google_vignette. 20 Maret 2024.

